



## Konsisten Serahkan LKPD 2022 Lebih Awal

**YOGYA (MERAPI)** - Pemerintah Kota Yogyakarta mempertahankan konsistensi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah lebih awal ke Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DIY, kali ini untuk laporan tahun anggaran 2022 dan menjadi salah satu yang tercepat dibanding kabupaten lain di DIY.

"Kami memberikan apresiasi karena Pemerintah Kota Yogyakarta bisa mempertahankan tradisi menyerahkan laporan keuangan lebih cepat," kata Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIY Widhi Widayat dilansir dari Antara di Yogyakarta, Selasa (10/1).

Pemerintah daerah memiliki waktu hingga maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk menyerahkan laporan keuangan untuk diperiksa oleh BPK.

Tradisi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyerahkan LKPD di awal tahun sudah berlangsung sejak 2021 atau saat menyerahkan laporan keuangan tahun anggaran 2020 dan dilanjutkan pada tahun berikutnya. "Harapannya, bisa menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain agar lebih awal menyerahkan LKPD," jelasnya.

BPK kemudian akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang disampaikan mengacu pada empat poin penilaian yaitu kesesuaian anggaran, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap aturan, dan efektivitas sistem



MERAPI-Humas Pemkot Yogyakarta

**Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi menyerahkan LKPD Tahun Anggaran 2022 kepada BPK RI Perwakilan DIY, Selasa (10/1).**

pengendalian intern.

Widhi menyebut, pada November dan Desember 2022, BPK sempat melakukan pemeriksaan interim terhadap penggunaan anggaran oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan saat itu masih didapati sejumlah persoalan administratif di sejumlah organisasi perangkat daerah.

Permasalahan tersebut di antaranya menyangkut pengembalian sisa bantuan keuangan khusus 2021 yang disetorkan ke kas daerah pada tahun anggaran 2022, serta ketidaksesuaian spesifikasi pengadaan di UPT Logam dan kekurangan volume pekerjaan pada pedestrian di kawasan Malioboro. "Tentunya pemerintah daerah bisa menindaklanjutinya karena sifatnya administratif," terangnya.

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi mengatakan, berupaya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan salah satunya melalui pendampingan ke OPD dalam mempercepat penyelesaian laporan keuangan. "Sejak awal, kami memasang target agar penyerahan LKPD ini tidak sampai melewati Januari," katanya.

Dengan penyerahan laporan lebih cepat, Sumadi berharap, BPK juga bisa melakukan pemeriksaan lebih awal dan pemerintah daerah bisa menindaklanjuti hasil pemeriksaan lebih cepat. Hingga tahun lalu, Pemerintah Kota Yogyakarta mampu mempertahankan penilaian atas LKPD dengan opini wajar tanpa pengecualian selama 13 kali berturut-turut. (\*)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Januari 2025  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005